



Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

M. Iqbal, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M. Yoga Pratama Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Sandi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Sabili Yudha

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: moehammadiqbaldely78@gmail.com

Abstrak. *The purpose of this mini-research is to: 1) comprehend how PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk applies excellent corporate governance concepts; 2) To comprehend the challenges PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk has in putting strong corporate governance into practice. Using a case study methodology, this kind of research is included in qualitative research. The study's findings demonstrate how successfully Bank BNI has used the openness concept. In compliance with stakeholders' rights, the company makes information readily available to them and distributes it in a timely, sufficient, comprehensible, accurate, and comparable way. Openness Bank BNI provides yearly explanations of all firm information. This information is readily available to us via electronic media or the official BNI Bank website.*

Keywords: *(Implementation; Good Corporate Governance*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian mini ini adalah untuk: 1) memahami bagaimana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang unggul; 2) Untuk memahami tantangan yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian semacam ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan keberhasilan Bank BNI dalam menerapkan konsep keterbukaan. Sesuai dengan hak-hak pemangku kepentingan, perusahaan menyediakan informasi bagi mereka dan mendistribusikannya secara tepat waktu, memadai, dapat dipahami, akurat, dan dapat dibandingkan. Keterbukaan Bank BNI memberikan penjelasan tahunan atas seluruh informasi perusahaan. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui media elektronik atau website resmi Bank BNI.*

Kata Kunci: *Penerapan; Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Semua kategori merasa sangat terbebani oleh krisis keuangan yang mengguncang benua Asia, termasuk Indonesia, antara tahun 1997 dan 1998. Menurut Baird (2000), salah satu penyebab utama krisis ekonomi di Indonesia dan banyak negara Asia lainnya adalah kurangnya penerapan aplikasi tata kelola perusahaan di sebagian besar bisnis yang saat ini beroperasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang dimiliki oleh sektor swasta. Kerangka Tata Kelola Perusahaan Secara Umum (GCG) terdiri dari beberapa mekanisme yang mencerminkan struktur manajemen perusahaan. Ini menetapkan alokasi hak dan tanggung jawab di antara pemangku kepentingan yang berbeda, seperti pemegang saham, Dewan Direksi, manajer, karyawan, dan pihak berkepentingan lainnya.

Selain itu, GCG juga menekankan gagasan bahwa tata kelola perusahaan merupakan arahan dari seluruh pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan dan berperilaku demi kepentingan terbaik perusahaan sejak berdirinya perusahaan. Kini saatnya mengajukan pertanyaan mendalam mengenai independensi, akuntabilitas, dan integritas kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia, khususnya di industri perbankan yang selama ini bertumpu pada keyakinan dan amanah masyarakat. Menurut Krisna Wijaya (2002:48), industri perbankan mempunyai ciri-ciri manajemen yang unik. Alasan utamanya adalah karena ada tiga komponen utama yang perlu diikuti: kehati-hatian, transparansi, dan kepercayaan. Tujuan utama bank adalah untuk menjunjung tinggi kepercayaan dan menghindari potensi bahaya. Individu hanya menyimpan uangnya di bank dengan harapan bahwa uang tersebut akan mendapat penggantian beberapa pendapatan bunga. Uang ini kemudian akan digunakan untuk berbagai investasi, termasuk membeli aset dan memberikan pinjaman. Perbankan yang bersifat prudential mempunyai bahaya dan dapat menjadi malapetaka bagi industri perbankan apabila tidak dikelola secara profesional, transparan, dan penuh kehati-hatian. Sistem manajemen perbankan nasional diperlukan dalam tata kelola perbankan nasional agar para bankir dapat menjadi acuan dan inspirasi dalam menjalankan operasional perbankannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan bank juga perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaannya netral secara moral, beroperasi dengan hati-hati, dan menjaga integritas. Dengan demikian, industri perbankan akan mampu tumbuh mandiri, memberikan kontribusi yang signifikan, dan bersinergi mencapai kinerja optimal dalam memajukan visi dan tujuan perbankan nasional pada segmen perekonomian nasional dan daerah.

Ada yang berpendapat bahwa gagasan tata kelola perusahaan merupakan perpanjangan dari teori keagenan, yang berhubungan dengan fenomena pembagian kerja antara kepemilikan dan manajemen dalam bisnis, khususnya di perusahaan-perusahaan besar dan kontemporer. Menurut teori keagenan, prinsip adalah pihak yang mengalihkan seluruh atau sebagian sumber dayanya untuk pembangunan oleh pihak lain (Ariyoto, 2000). Berikut ini adalah anggapan yang dibuat oleh teori keagenan:

1. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian demi kepentingan terbaiknya. Akibatnya, para pelaku di bawah kendali prinsipal akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi.
2. Karena dapat bernalar secara logis, orang mampu membentuk harapan-harapan yang obyektif.

Berdasarkan anggapan yang ditetapkan oleh teori keagenan, terbukti bahwa terdapat alasan untuk meyakini bahwa salah satu mitra dalam hubungan kooperatif menyalahgunakan kesempatan untuk memajukan kepentingannya sendiri. Salah satu teori yang membahas penyelesaian masalah manajemen perusahaan kontemporer adalah teori keagenan. Peran dewan direksi, efektivitas mekanisme tata kelola (dalam bentuk pasar untuk pengendalian perusahaan, pinjaman, penggunaan dividen, kompensasi bagi manajer, dan bawahan), kekuasaan dalam perusahaan, dan sifat perjanjian yang dibuat, di sisi lain, menjadikan teori agensi sebagai teori yang secara inheren memiliki kelemahan karena adanya penyederhanaan dan generalisasi. Sebagai hasil dari perubahan perspektif beberapa ahli, gagasan tata kelola perusahaan yang efektif diterapkan dalam bisnis. Diharapkan perusahaan dapat memberikan respon positif kepada semua pihak yang berkepentingan dengan konsep ini. Tata kelola perusahaan penting karena beberapa alasan (Dahlan, 2003), termasuk:

1. Krisis keuangan Asia

2. Meningkatkan tuntutan tanggung jawab

3. Terciptanya pasar internasional

Pembentukan proses tata kelola perusahaan yang baik memerlukan empat prinsip dasar berikut: tanggung jawab, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan. Semua pemangku kepentingan akan menerima informasi yang akurat dan tepat waktu dari perusahaan jika transparan. Penerapan proses audit yang solid sebagai bagian dari sistem check and balances internal tercermin dalam akuntabilitas. Konsekuensinya, jika pengawasan yang efisien dilakukan, yang didasarkan pada pembagian wewenang di antara pemegang saham, komisaris independen, dan direktur, maka akuntabilitas dapat dicapai. Kebutuhan untuk mendefinisikan hak-hak investor, sistem hukum, dan penegakan peraturan adalah bagian dari keadilan, atau konsep keadilan. Konsep keadilan ini sangat penting, terutama ketika mencoba melindungi seluruh pemegang saham—termasuk minoritas—dari penipuan, insider trading yang merugikan, atau tindakan bisnis yang merugikan kepentingan kelompok pemangku kepentingan minoritas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya penelitian tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam bentuk kata-kata. konteks alami dan alami yang khusus. memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan standar tersebut di atas, akuntabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dicapai dengan memperjelas peran dan tugas masing-masing organ organisasi sesuai dengan visi, maksud, tujuan, dan strategi perusahaan. Setiap tahunnya, seluruh pegawai Bank BNI mengembangkan, memperjelas, dan melaksanakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing organisasi sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bisnis dan pedoman GCG terkait. Untuk menjamin bahwa setiap departemen dalam perusahaan mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan berkontribusi terhadap penerapan GCG, Bank BNI memaparkan upayanya untuk menetapkan prinsip akuntabilitas Kompetensi perusahaan.

Ada baiknya jika kita membagi pekerjaan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman masing-masing Komisaris. Tindakan Dewan Komisaris untuk menjaga kompetensi masing-masing anggota. Selanjutnya, hal ini juga tercermin dalam peraturan mengenai tingkat pendidikan dan pengalaman profesional yang diperlukan. Bank BNI mendukung terciptanya GCG dan mewajibkan seluruh direksi, staf, dan anggota Dewan Komisaris menandatangani komitmen penerapan GCG setiap awal tahun. Selain itu, BNI juga secara konsisten menyesuaikan diri dengan kemajuan praktik-praktik terbaik GCG yang kini berlaku di tingkat nasional, regional, dan dunia yang relevan dengan kondisi Indonesia dan memenuhi tuntutan praktik di BNI. Hasilnya, praktik GCG di BNI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hasil pemeringkatan GCG ditentukan melalui evaluasi mandiri dan Berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan, penilaian pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang netral digunakan sebagai masukan untuk memetakan dan menyempurnakan prosedur GCG BNI.

Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kewajibannya, korporasi memandang bahwa setiap pegawai dan setiap unit organisasi dapat melaksanakan GCG. Hal ini diperkuat dengan Perencanaan Sumber Daya Manusia Human Capital Transformation Roadmap yang memberikan pengembangan keahlian dan keterampilan bagi seluruh pekerja BNI. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi global. Membangun kemampuan sejalan dengan tujuan Bank untuk memperkuat basis keuangan, yang berfungsi sebagai dasar ekspansi keuangan jangka panjang.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang luar biasa dengan kompetensi mendunia, penerapan manajemen sumber daya manusia yang diperhitungkan berpusat pada peningkatan dan realisasi kemampuan. Untuk memfasilitasi upaya strategis ini, Divisi Sumber Daya Manusia—yang terdiri dari empat fungsi utama—meningkatkan manajemen sumber daya manusia secara organisasi. Fungsi-fungsi ini meliputi strategi, kemitraan bisnis, keahlian, dan layanan. Setiap tahunnya, Bank BNI mengadakan rapat Direksi yang membahas topik pengembangan pengendalian internal perusahaan. Pendekatan Three Lines of Defense digunakan dalam pengembangan dan penerapan sistem pengendalian internal BNI. Tiga Garis Pertahanan yang saling melengkapi, terkoordinasi, dan terjalin jalur komunikasi efektif di antara mereka, digunakan untuk melaksanakan pengendalian internal. Untuk menjamin terselenggaranya sistem pengendalian intern pada unit operasional; pemantauan harian dilakukan oleh Compliance Officer (CO), dan audit berkala dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal. Selain melaksanakan tanggung jawab, BNI mempraktikkannya dengan menawarkan sistem reward dan punishment yang berpedoman pada pedoman GCG. Untuk menerapkan sistem ini, Bank BNI membentuk komite-komite khusus antara lain Komite Anti Fraud, Komite Sumber Daya Manusia, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain memberikan penghargaan kepada pegawai BNI yang luar biasa, mereka juga memberikan sanksi kepada pegawai BNI yang melanggar aturan. Dengan strategi tersebut diharapkan pegawai BNI semakin terpacu untuk meningkatkan permainannya.

B. Analisa Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

about the Rules for Issuers' or Public Companies' Financial Reports' Presentation and Disclosure. Every year, Bank BNI's Board of Directors meets to examine different challenges and/or the company's management initiatives in order to fulfill its promise to management. Following these sessions, the Board of Directors meets to discuss and deliberate on concerns and/or solutions. The Management Sector, Risk Management Sector, Internal Control Sector, and GCG Sector are the domains examined.

C. Analisa Penerapan Prinsip Independensi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Organisasi harus dijalankan secara mandiri agar dapat menerapkan GCG, mencegah campur tangan pihak luar dan mencegah pegawai menyalahgunakan kekuasaannya atau saling menyalahkan. Konsep independensi telah diterapkan oleh Bank BNI yang mengamanatkan agar pegawainya bebas dari afiliasi politik. Persyaratan ini dapat ditemukan dalam kode etik aktivitas politik yang dikembangkan Bank BNI. Seluruh insan BNI secara tegas dilarang terlibat dalam aktivitas politik apa pun sesuai kode etik. Selain itu, Bank BNI memberikan informasi untuk membantu pekerja menghindari konflik kepentingan yang timbul dari spesifikasi mengenai kuantitas, susunan, standar, dan independensi anggota Dewan Komisaris di antara Komisaris.

Demikian pula diatur dalam spesifikasi kuantitas, komposisi, standar, dan netralitas anggota Direksi. Selain itu, pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi serta pedoman perilaku Bank BNI dalam menangani benturan kepentingan memberikan informasi lebih lanjut.

D. Analisa Penerapan Prinsip Kewajaran pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyajikan pendapatan dan bagi hasil bank secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Bank telah mematuhi ketentuan yang mengatur hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik, dan BI sebagaimana diatur dalam persyaratan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank untuk menjamin efisiensi pelaksanaan fungsi audit eksternal. Dengan mempraktekkan mekanisme atau proses penanganan yang telah dibuat oleh Bank BNI, dilakukan upaya untuk meminimalisir ketidakbahagiaan pegawai dan meningkatkan keadilan dalam menangani dan menyelesaikan kesalahan pegawai. Oleh karena itu, jika terjadi suatu permasalahan, mekanisme ini berfungsi untuk memperjelas apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan keterbukaan Bank BNI dijalankan dengan baik. Sesuai dengan hak-hak pemangku kepentingan, perusahaan menyediakan informasi bagi mereka dan mendistribusikannya secara tepat waktu, memadai, dapat dipahami, akurat, dan dapat dibandingkan. Keterbukaan Bank BNI memberikan penjelasan tahunan atas seluruh informasi perusahaan. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui media elektronik atau website resmi Bank BNI. Informasi mengenai visi dan misi perusahaan, produk, tujuan bisnis, situasi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan remunerasi manajemen, pemegang saham pengendali, dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris Direksi, Dewan Komisaris, dan anggota disertakan. keluarganya dalam organisasi dan bisnis lainnya, sistem manajemen risiko internal untuk pengawasan dan pengelolaannya, serta sistem GCG dan penerapannya.

Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, akuntabilitas dicapai dengan tanggung jawab yang jelas, artinya seluruh pegawai harus menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugasnya. Konsep akuntabilitas diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui penghapusan peran dan tanggung jawab ganda. Selanjutnya Bank BNI memberikan pedoman dan informasi mengenai inisiatif penerapan prinsip akuntabilitas kompetensi organisasi.

Memastikan kebermanfaatan informasi yang diberikan bagi pemangku kepentingan Laporan Keuangan merupakan implementasi tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas laporan keuangannya. Laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku. Bertanggung jawab atas komitmen manajerial, Bank BNI telah menyelenggarakan rapat Direksi yang membicarakan beberapa topik dan/atau teknik pengelolaan perusahaan.

Konsep independensi telah diterapkan oleh Bank BNI yang mengamanatkan agar pegawainya bebas dari afiliasi politik. Untuk membantu pekerja menghindari benturan kepentingan, Bank BNI juga memberikan informasi mengenai kriteria, kualifikasi, dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris independen dan komisaris.

Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bank telah mematuhi ketentuan yang mengatur hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik, dan BI sebagaimana diatur dalam undang-undang Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank untuk menjamin efisiensi pelaksanaan fungsi audit eksternal. Sesuai dengan persyaratan yang berlaku, digunakan prosedur lelang untuk memperoleh jasa dari kantor akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. 2001. Good Corporate Governance Sebagai Syarat Perusahaan Publik Untuk Mendapatkan Investasi. *Lintasan Ekonomi* volume XVIII Nomor 2. Juli 2001.
- Ariyoto, Kresnohadi. 2000. Good Corporate Governance dan Konsep penegakannya di BUMN dan Lingkungannya. No.10 Th.XXIX No.7 Th Maret 2000.
- Baird, M. . (2000). „The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries,“ Paper.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Ahmad. 2003. Disclosure Dan Corporate Governance: Suatu Tinjauan Teoritis. *TEMA* Volume IV Nomor 1. Maret 2003.
- Indrayani, Mei dan Nurkholis. 2001. Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. *TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)*. Vol. II: 136 – 156.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 8 Nomor 1. Maret 2006: 1-9.
- Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Enam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta.
- Krisna Wijaya. 2002. Reformasi Perbankan Nasional. Jakarta: Harian Kompas.
- Kusumaningtyas, Arindri. 2011. Penerapan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk).“Laporan Tahunan Annual Report Tahun 2012”. 2012. (<http://www.bni.co.id>), diakses 14 Juni 2013)
- Moleong, Lexi J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publications Service. France: 9-19. Pedoman Umum Good Corporate Governance”. 2006. (<http://www.fcgi.or.id>), diakses 17 Juli 2013)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.